

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

III. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi.	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas kecuali pemilik data mengizinkan dan diatur oleh ketentuan perundang-undangan	- Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
2	Dokumen PNS yang sedang dalam proses pembinaan disiplin dan PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas kecuali pemilik data mengizinkan dan diatur oleh ketentuan perundang-undangan	- Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
3	Dokumen PNS yang sedang dalam proses pembinaan perceraian	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Terbatas (sampai terbitnya Akta Cerai)	- Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
4	Dokumen proses mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h - PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	- Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
		- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i				
5	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia --->: lelang yang masih berjalan atau kegiatan yang masih berjalan atau belum dipertanggungjawabkan pemerikaan/ pengawasan)	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbatas, kecuali setelah selesai proses audit	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
6	Dokumen Penawaran Kontrak, ketika masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpress 70 Tahun 2012 dan diubah lagi dengan Perpres No. 4 Tahun 2015	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/ Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian

Wonogiri, 02 Maret 2021

f. PIt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan


Drs. SUHARNO, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630911 199003 1 007